

ABSTRAK

Nama : Hamonangan Syahdan Hutabarat
Judul Disertasi : Hak Kreditor Separatis yang Tidak Menyetujui Rencana Perdamaian Debitur Untuk Memperoleh Kompensasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Jumlah Halaman : 326 halaman

Disertasi ini adalah karya pertama yang mengangkat masalah hukum yang timbul dari Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai kompensasi terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang mengakibatkan beberapa bahkan banyak masalah dalam praktik. Klausul kompensasi ini tidak ditemukan dalam undang-undang kepailitan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, filosofis, konseptual, kasus dan analisis hukum dari segi ekonomi, penelitian dalam disertasi ini berhasil untuk menyimpulkan bahwa pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap debitor, kreditor separatis baik yang menyetujui maupun tidak menyetujui rencana perdamaian, kreditor konkuren dan juga mempengaruhi keadaan ekonomi negara dengan menghasilkan hasil PKPU yang bias dan tidak pasti. Keberadaan pasal ini memiliki manfaat sendiri dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menebus aset jaminan, namun perlu diparafrasa agar pasal tersebut tidak berbenturan dengan tujuan dari PKPU itu sendiri dan tidak mencederai kepentingan semua pihak dalam PKPU. Pasal ini harus memberikan kepastian terhadap debitor saat mereka memberikan kompensasi kepada kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian termasuk mekanisme pembayaran serta jangka waktunya sehingga kepentingan dua belah pihak terlindungi. Pasal ini juga harus memuat akibat hukum terhadap debitor jika mereka gagal untuk memberikan kompensasi tersebut dan apa hak kreditor separatis yang timbul sebagai akibat ketidakpatuhan tersebut.

Kata Kunci: kompensasi, pkpu, kreditor separatis

ABSTRACT

Name : Hamonangan Syahdan Hutabarat
Dissertation Title : *The Right of Secured Creditor Who Do Not Agree With The Debtor's Composition Plan To Receive Compensation In The Suspension of Debt Payment Obligation Process*
Number of Pages : 326 pages

This dissertation is the first thesis to pinpoint the legal issues derived from the Article 281 paragraph (2) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation regarding compensation towards secured creditor(s) who do not agree with the composition plan which has brought several if not many legal issues in practice. The compensation clause is not found under bankruptcy law of other countries namely the United States of America and Netherland. Utilising the statute, philosophical, conceptual, case and economic analysis of law approaches, the research on this dissertation has managed to conclude that the said article creates legal uncertainties towards the debtor, secured creditors either those who agree and/or disagree with the composition plan, unsecured creditor and also in certain way impacting the economic condition of the country by producing bias and uncertain outcome of PKPU. The existence of the article has its own benefit by giving chance to the debtor to redeem the collateral asset, but it needs to be paraphrased so that the article does not conflict with the purpose of the PKPU itself and does not harm the interest of all parties in the PKPU. The article should provide certainty towards the debtor when they give the compensation to the secured creditor who disagree with the composition plan as well as the mechanism on the payment and time limit so that the interest of both parties are well protected. The article should also incorporate the legal consequences towards the debtor should they fail to give the said compensation and the rights of the secured creditor that arise as result from that non compliance.

Keywords: compensation, pkpu, secured creditor.